

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI MANDAT UNMISS DALAM KONFLIK SUDAN**  
**SELATAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang upaya-upaya yang dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menyelesaikan konflik di Sudan Selatan pada 2013 sesuai dengan tujuan dari piagam PBB. Upaya yang dilakukan oleh PBB yaitu melalui intervensi PBB dalam konflik di Sudan Selatan untuk membantu penyelesaian konflik tersebut.

Menurut Johan Galtung, ada tiga tahapan resolusi konflik yaitu: *peacekeeping*; *peacemaking*; dan *peacebuilding*. United Nation Mission in South Sudan (UNMISS) yang diturunkan pada 2011 menjadi instrumen PBB dalam menjalankan *peacekeeping operation* yang bertindak sebagai pihak luar dalam menengahi konflik. Pasukan perdamaian karena fleksibilitasnya, menjadi garda depan dari PBB dalam mengatasi konflik di Sudan Selatan.

Dalam pembaruan mandatnya dalam resolusi dewan keamanan nomor 2155 tahun 2014, UNMISS dibebankan mandat *peacekeeping operation* yaitu: *protecting of civiliant*; pemantauan dan investigasi HAM; Menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan Mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities (CoH)*.

A. *Protecting of Civiliant (PoC)* dalam rangka penegakan HAM

Perlindungan warga sipil (*Protecting of Civiliant*), yang ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan dengan mengadopsi aturan Bab VII dalam Piagam,

adalah pusat dari aspek perlindungan operasi penjaga perdamaian PBB. Hal tersebut membahas tentang misi dan otoritas hukum eksplisit untuk menggunakan kekuatan dalam melindungi warga sipil. Namun, keputusan Dewan Keamanan tidak secara eksklusif mendefinisikan wewenang dalam penggunaan kekuatan, termasuk untuk melindungi warga sipil. Penggunaan kekuatan dalam operasi penjaga perdamaian PBB memiliki salah satu dari dua dasar hukum: (a) itu tegas diizinkan di bawah Bab VII (mandat seperti perlindungan warga sipil); atau (b), itu tersirat di bawah rubrik hak untuk membela diri. (Gray, 2008, hal. 313-314)

Dari kedua dasar hukum tersebut, mandat diaplikasikan pada konteks yang lebih luas dari Piagam. Kewenangan hukum sebuah operasi penjaga perdamaian PBB untuk menggunakan kekuatan dan melanggar batas atas kedaulatan negara tuan rumah adalah lebih besar dari kekuatan yang dimiliki negara-negara lain. Hal ini mencerminkan status PBB sebagai organisasi internasional universal dari tujuan yang luas yang memiliki legitimasi, dan bahwa operasi penjaga perdamaian mewakili masyarakat internasional bertindak melalui PBB.

Ada dua aspek dari PoC yang berhubungan dalam konteks keamanan. Pertama, dikemas dalam konsep '*Responsibility to Protect*', beroperasi pada tingkat strategis dan merupakan interpretasi dari *jus ad bellum*. (Orford, 2011)

Konseptualitas ini digunakan untuk mencegah dan menghentikan genosida dan kejahatan perang yang meluas, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis, dan mengidentifikasi tanggung jawab perlindungan negara, PBB dan masyarakat internasional yang lebih luas. Nicholas Tsagourias menunjukkan bahwa konsep '*Responsibility to Protect*' dan '*Protecting of Civilian*' memang

saling terkait dan keduanya telah menjadi alat utama untuk memberikan perlindungan kepada sipil. (Willmot & Sheeran, 2013)

Aspek kedua, terwujud dalam mandat Dewan Keamanan, yang umumnya difokuskan pada tingkat operasional dan didasarkan pada perjanjian keamanan kolektif yang juga diartikulasikan dalam Piagam PBB. PoC dalam mandat difahami oleh pasukan perdamaian sebagai perlindungan fisik kepada warga sipil dari ancaman kekerasan. (Security Council Meeting Record S/PV.4054, 1999) Dipengaruhi oleh konsep *protecting of civiliant* yang beredar dalam aturan kemanusiaan dan aturan hak asasi manusia, mandat ditafsirkan lebih luas dalam Konsep Operasional DPKO PBB dan DFS tentang Perlindungan Penduduk Sipil, di mana hal itu dipahami mencakup tiga 'tingkatan' kegiatan: (i) perlindungan melalui proses politik; (ii) perlindungan dari kekerasan fisik; dan (iii) pembentukan lingkungan pelindung. Penafsiran ganda ini, dimaknai secara sempit sebagai perlindungan fisik, sementara pelaksanaan mandat dipahami untuk mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan dalam operasi penjaga perdamaian yang berkontribusi terhadap konsep yang lebih umum dalam perlindungan. (Willmot & Sheeran, 2013)

Krisis kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan pada Desember 2013 mengakibatkan UNMISS mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kebutuhan mendesak untuk pasukan tambahan guna melindungi warga sipil dan membantu dalam pemberian bantuan kemanusiaan dijamin melalui kerjasama diamanatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan 2132 pada 24 Desember 2013. UNMISS diminta untuk meningkatkan pasukan UNMISS ke

jumlah 12.500 personil dan komponen polisi ke jumlah 1.323 personel dengan prioritas mandat untuk perlindungan terhadap warga sipil.

UNMISS menerapkan strategi berjenjang tiga dengan perlindungan warga sipil tetap berlaku dan akan direvisi mengingat perubahan yang signifikan dalam konteks operasional. Misi telah mengembangkan rencana jangka menengah, rencana tanggap berjenjang tiga untuk memandu kegiatan perlindungan selama krisis saat ini.

Di tingkat pertama dari rencana (perlindungan melalui proses politik), UNMISS mengintensifkan keterlibatan politik dengan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk membantu mencegah eskalasi kekerasan dan menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. UNMISS mendesak mendesak pihak yang berkonflik menahan diri dan dipromosikan resolusi politik damai untuk krisis melalui proses yang dipimpin IGAD. Misi ini juga telah terlibat dengan para pemimpin masyarakat sipil, pemuda dan gereja, sebagai langkah awal bagi perkembangan akhir dari proses rekonsiliasi yang inklusif. (Security Council, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 11) Pesan lain pada ketidakberpihakan UNMISS juga disampaikan secara terbuka di situs untuk perlindungan warga sipil. Misi juga telah menerapkan langkah-langkah pengelolaan konflik, termasuk mempromosikan dialog antara masyarakat untuk, antara lain, mendorong internal pengungsi untuk menahan diri dari bergabung pertempuran.

UNMISS terus berusaha melibatkan Negara dan aktor non-negara tentang pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan 1325 tahun 2000 dan resolusi terkait pada

perempuan dan perdamaian dan keamanan, khususnya di situs untuk perlindungan warga sipil, memfokuskan perhatian mereka pada tanggapan terhadap konflik terkait kekerasan seksual dan genderbased dan perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak perempuan. Misi juga memprakarsai kegiatan untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses manajemen konflik dan perdamaian, termasuk dengan mendukung Departemen Gender. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 8)

Di bawah lapis kedua dari rencana (perlindungan dari kekerasan fisik), pada bulan November 2013 Misi mulai memperkuat kehadiran militernya di lokasi di Jonglei, Lakes, Warab dan Unity di mana warga sipil dianggap paling berisiko, dalam persiapan untuk musim kering. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 11) Namun, dengan terjadinya krisis pada tanggal 15 Desember, UNMISS terus melakukan perlindungan fisik ke sekitar 100.000 pengungsi di pangkalan di Bor (Jonglei), Malakal (Upper Nile), Juba (Central Equatoria), Bentiu dan Pariang (Unity), Wau (Western Bahr el Ghazal), Rumbek (Lakes) dan Melut, Renk dan Nasser (Upper Nile). Mengingat bahwa militer yang signifikan, polisi dan rekayasa aset yang diperlukan untuk melindungi warga sipil di pangkalan UNMISS dari ancaman keamanan eksternal dan internal untuk mempertahankan keberadaan jumlah warga sipil di *camp* UNMISS menempatkan regangan besar pada sumber daya Mission. UNMISS mengkonversi 1,7 juta m<sup>2</sup> lahan menjadi situs untuk perlindungan warga sipil, yang membutuhkan pembangunan 13 km dari parit dan perlindungan perimeter dan pencahayaan dan pembangunan jalan untuk patroli. Mitra kemanusiaan yang bekerja sama dengan Misi memastikan bahwa bantuan

akan diberikan bagi mereka yang terlantar di dalam situs. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 8)

Aset militer yang signifikan telah diperlukan untuk melindungi warga sipil di pangkalan UNMISS dari ancaman eksternal dan internal. Kehadiran mantan kombatan, ketersediaan senjata dan yang memadai di situs telah menghasilkan keamanan yang signifikan dan kekhawatiran-kejahatan terkait. Misi telah menanggapi insiden setiap hari, termasuk dengan penggunaan kekuatan (*use of force*). UNMISS telah melakukan pencarian senjata periodik di *camp* untuk mempertahankan karakter sipil mereka. Ia telah memperkenalkan aturan-aturan dasar untuk pengungsi dan bekerja dengan para pemimpin dan pemerintah daerah untuk mengatasi kasus-kasus pidana. situasi telah diambil UNMISS ke wilayah yang belum dipetakan, karena berkembang, bersama-sama dengan Sekretaris Jendral, merancang strategi untuk mengatasi kriminalitas di *camp* perlindungan dan memastikan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan strategi.

Tuntutan yang dibebankan pada misi dalam dan dekat pangkalan dan keterlambatan kedatangan pasukan tambahan telah dibatasi kemampuan militer untuk secara proaktif berpatroli di lokasi yang terkena dampak konflik. Patroli telah berlangsung siang dan malam hari di Juba pada bulan Januari dan secara bertahap telah diperluas ke Bor, Malakal dan Bentiu untuk mencegah kekerasan dan membantu menciptakan lingkungan keamanan yang membaik dengan maksud untuk memungkinkan kembalinya para pengungsi. Dengan kedatangan pasukan tambahan resmi di bawah resolusi 2132 tahun 2013, Pada 22 Februari UNMISS telah merawat 14.745 orang di 13 klinik medis, termasuk 1.849 untuk luka tembak, dan mengevakuasi ratusan korban dari daerah pertempuran sengit.

kombatan terluka dari kedua belah pihak telah menerima perawatan medis di pangkalan UNMISS. Selama periode dari awal krisis hingga 10 Februari, 110 bayi lahir di situs untuk perlindungan warga sipil di pangkalan UNMISS di Juba, 50 lahir di Malakal, 13 di Bentiu dan 10 di Bor.

Di bawah tingkat ketiga dari rencana (pembentukan lingkungan pelindung), UNMISS telah berfokus pada menciptakan kondisi keamanan yang kondusif untuk pemberian bantuan kemanusiaan di situs perlindungan bagi pengungsi dengan menggunakan aset Misi untuk memberikan manajemen situs dan untuk mendukung lembaga kemanusiaan di pemberian bantuan. Dalam konteks ini, misi telah berkoordinasi dengan cluster perlindungan dan aktor kemanusiaan lainnya di bawah kepemimpinan Resident Humanitarian Coordinator, dan telah melibatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat pada masalah keamanan dan perlindungan dan merespon kebutuhan individu milik kelompok yang paling rentan. UNMISS juga telah memperkuat pemantauan hak asasi manusia dan kapasitas investigasi. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 11-12)

UNMISS juga telah memperluas sistem *Early Warning* yang menjadi peringatan dini keseluruhan organisasi dan mekanisme respon yang mencakup Misi dan tim PBB. Penekanan telah ditempatkan pada pengembangan rekomendasi respon awal yang tepat untuk mengurangi ancaman diidentifikasi. Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 2155 (2014), komponen polisi UNMISS terus meninjau peluang khusus untuk koordinasi operasional dengan polisi nasional sebagai bagian dari inisiatif percayadiri kepolisian dan membangun kepercayaan nasional yang diluncurkan bersama-sama dengan mitra internasional.

Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan keamanan yang membaik di Juba. Hal tersebut membangun kepercayaan antara masyarakat dan pengungsi internal kepada kepolisian nasional, dengan fokus pada potensi pengembalian masyarakat. Koordinasi operasional UNMISS dengan polisi nasional didasarkan pada penguatan lingkungan pelindung dan dilakukan secara ketat sesuai dengan aturan HAM PBB *due diligence*.

Mengingat tingginya tingkat sisa-sisa bahan peledak perang di daerah konflik, United Nations Mine Action Service membersihkan sekitar 6 juta m<sup>2</sup> tanah dari artileri yang tidak meledak. Sebanyak 32.877 item artileri yang tidak meledak telah ditemukan dan dihancurkan dari basis UNMISS, akses jalan utama dan lapangan terbang, daerah operasi kemanusiaan dan daerah yang diidentifikasi di luar pangkalan UNMISS. Setelah pertempuran di Malakal dan Bentiu, United Nations Mine Action Service melakukan kegiatan pembersihan di kedua bandara untuk menghilangkan sisa-sisa bahan peledak perang dan memungkinkan UNMISS untuk melanjutkan operasi udara. Selain itu juga dilakukan survei dan kegiatan clearance di lembaga kemanusiaan dan gudang untuk menghapus sisa-sisa bahan peledak perang. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 9)

Sekitar 40 persen (295.880 orang) dari total populasi pengungsi adalah anak-anak. Dalam situs perlindungan Bentiu, Bor, Juba dan Malakal, 592 anak-anak tanpa pendamping atau terpisah menerima *tracing* keluarga dan dukungan reunifikasi. Dari jumlah itu, 68 telah berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Selain itu, 84 keluarga yang mencari anak yang hilang telah terdaftar nama-nama anak-anak mereka yang hilang. Dalam situs Rumah Perlindungan PBB, lima anak



dilaporkan diculik dan disiksa oleh SPLA, dua di antaranya disimpan selama dua hari dalam wadah penjara. Lembaga perlindungan anak telah mendirikan pusat rujukan di situs perlindungan bagi anak-anak yang selamat dari kekerasan berbasis gender.

Sementara itu, laporan yang telah diterima menyatakan bahwa mobilisasi dan perekrutan pemuda oleh SPLA dan pasukan anti-pemerintah telah terjadi. Yang disebut "putih tentara", yang Mr. Machar mengatakan berada di bawah komandonya, dilaporkan terdiri sejumlah besar anak-anak bersenjata.

Kejahatan kekerasan seksual serius yang berhubungan dengan konflik juga telah dilaporkan di empat wilayah yang secara langsung terkena dampak konflik, dengan tuduhan yang kredibel bahwa kekerasan tersebut telah dilakukan oleh SPLA, polisi nasional dan pasukan anti-pemerintah. Insiden makam yang sekarang sedang diselidiki, seperti tercermin pada bagian hak asasi manusia, dan akan dilaporkan ke Dewan Keamanan berdasarkan berdasarkan resolusi Dewan 1960 tahun 2010.

Ketika pertempuran meletus di Juba dan menyebar ke seluruh besar wilayah Upper Nile, puluhan ribu warga sipil melarikan diri dari daerah di mana sejumlah besar pembunuhan itu terjadi, termasuk untuk melarikan diri serangan yang ditargetkan terhadap komunitas tertentu, dan tiba di senyawa UNMISS di Juba, Bor , Akobo, Bentiu, Malakal dan Melut untuk mencari perlindungan. Misi membuka gerbang dan insinyur militer, bekerja sama dengan mitra kemanusiaan, situs cepat dipersiapkan dalam senyawa untuk perlindungan warga sipil, walaupun memiliki fasilitas minimum untuk menampung mereka. Sejak itu, sebanyak

85.000 warga sipil telah mencari perlindungan di delapan senyawa UNMISS di seluruh negeri. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 11-12)

#### B. Pemantauan dan Investigasi HAM

Tugas yang diamanatkan Dewan Keamanan kepada pasukan penjaga perdamaian juga melibatkan pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia di daerah misi dan pengembangan kapasitas lokal untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Beberapa misi telah diberikan tugas yang lebih luas yang melampaui hanya pemantauan dan pelaporan, termasuk kewenangan untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM, membantu upaya nasional dan internasional untuk mengakhiri impunitas, mendukung pembentukan mekanisme keadilan transisi, termasuk pemeriksaan, memberikan perhatian khusus untuk hak-hak perempuan dan anak-anak, melalui pemantauan, advokasi dan langkah-langkah lain seperti memfasilitasi akses terhadap keadilan. Mandat juga menyertakan dukungan untuk pengembangan lembaga HAM nasional dan penegakan hukum pelatihan dan pejabat nasional lainnya. Pemantauan hak asasi manusia ini mungkin dilakukan dengan berkerjasama dengan polisi PBB, yang berperan juga dalam pemantauan penyalahgunaan wewenang oleh Polisi lokal atau berpartisipasi dalam penyelidikan bawah pimpinan komponen hak asasi manusia.

Dalam rangka membangun kehadiran dan kebebasan bergerak dalam memberikan perlindungan fisik untuk penduduk sipil, operasi penjaga perdamaian PBB perlu mempertahankan persetujuan politik dan kerjasama dari pemerintah

tuan rumah dan pihak berwenang. Pemeliharaan persetujuan tersebut diawasi melalui pemantauan HAM dan pelaporan tentang masalah yang mengidentifikasi unsur pemerintah telah melakukan pelanggaran berat (Department of Peacekeeping Operations, 2008, hal. 53)

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan melibatkan banyak korban sipil dan pelanggaran HAM berat terjadi. UNMISS melalui resolusi Dewan Keamanan nomor 2155 tahun 2014 paragraf 4 poin b, diberikan mandat untuk melakukan pemantauan dan investigasi HAM, dengan penjabaran sebagai berikut:

- i. To monitor, investigate, verify, and report publicly and regularly on abuses and violations of human rights and violations of international humanitarian law, including those that may amount to war crimes or crimes against humanity;*
- ii. To monitor, investigate, verify and report specifically and publicly on violations and abuses committed against children and women, including all forms of sexual and gender-based violence in armed conflict by accelerating the implementation of monitoring, analysis and reporting arrangements on conflict-related sexual violence and by strengthening the monitoring and reporting mechanism for grave violations against children;*
- iii. To coordinate with, and offer technical support to, where appropriate, the African Union's Commission of Inquiry for South Sudan;*

Dalam laporan sekretaris jendral PBB, UNMISS harus terus memberikan prioritas untuk pemantauan, investigasi, verifikasi dan secara teratur melaporkan situasi hak asasi manusia, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian damai. Hal ini harus dilakukan dengan maksud untuk (Security Council, Special report of the Secretary-General on the review of the mandate of the UNMISS S/2015/899, 2015, hal. 12):

- a. Mengidentifikasi sinyal peringatan dini dan kecenderungan orang yang beresiko untuk memberi makan ke dalam dan menginformasikan tanggapan Misi berkenaan dengan perlindungan warga sipil;
- b. Peningkatan kapasitas Misi untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual yang berhubungan dengan konflik, dalam rangka meningkatkan pelaporan rutin dan mendukung proses akuntabilitas;
- c. Mengidentifikasi tantangan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan terlibat badan-badan PBB, UNMISS bagian substantif dan instansi pemerintah terkait dalam memfasilitasi tindakan untuk mengatasi tantangan-tantangan melalui advokasi, reformasi hukum, perubahan kebijakan, pelatihan, peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas ;
- d. Menerbitkan laporan umum reguler untuk menginformasikan proses politik nasional dan internasional, mendukung proses akuntabilitas dan upaya dukungan advokasi

Pada tanggal 8 Mei 2014, UNMISS merilis laporan publik yang komprehensif tentang pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum

kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh kedua belah pihak sejak pertengahan Desember 2013. Laporan ini mendokumentasikan konsekuensi negatif yang meluas dari konflik pada situasi hak asasi manusia di banyak bagian dari negara, termasuk secara terencana terhadap warga sipil - baik warga negara dan orang asing - pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran lainnya, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, kekerasan berbasis gender, penghilangan paksa dan perlakuan buruk serta penyiksaan. Kelompok bersenjata dari kedua belah pihak juga dirusak, dijarah, dibakar dan sebaliknya menghancurkan rumah-rumah pribadi, bangunan umum, pasar dan toko-toko. UNMISS terus melanjutkan investigasi ke mereka terhadap indikasi lainnya.

Selama merebut kembali Bentiu, wilayah Unity, oleh pasukan oposisi pada 15 April, beberapa pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional terjadi. UNMISS menemukan informasi yang dapat dipercaya tentang pembunuhan di luar hukum dan serangan terhadap warga sipil di rumah sakit dan masjid Kali-Balek, selain penjarahan kota-kota Bentiu dan Rubkona. Penangkapan Bentiu oleh SPLM/A-IO menyebabkan hampir 5.000 pengungsi internal (kebanyakan Nuer) telah mencari perlindungan di situs UNMISS di Bor. Kabarnya dalam aksi tersebut, orang-orang muda bersenjata secara paksa memasuki situs pada tanggal 17 April, di mana mereka melepaskan tembakan, meninggalkan 51 orang tewas. (Security Council, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 9)

Pada tanggal 29 Juni 2015, UNMISS merilis sebuah laporan hak asasi manusia singkat, yang melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan sebagai dampak meningkatnya pertempuran di wilayah Greater Upper Nile pada bulan

April dan Mei 2015. Terjadinya kekerasan seksual, termasuk perkosaan, pemerkosaan dan penculikan, telah meningkat secara signifikan selama kebangkitan dalam pertempuran. Setidaknya 172 perempuan dan anak perempuan dilaporkan diculik dan 79 mengalami kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, dengan beberapa kemudian ditembak mati atau dibakar hidup-hidup di tukuls mereka di Unity. Selain itu, puluhan anak-anak dilaporkan tewas, diperkosa dan diculik selama April dan Mei. Setidaknya 93 perempuan, terutama dari suku Shilluk, dilaporkan diculik oleh tentara SPLA di Upper Nile. Ada beberapa laporan kekerasan seksual dan pemerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di pos pemeriksaan militer karena mereka meninggalkan situs perlindungan UNMISS untuk kegiatan mata pencaharian, seperti pengumpulan makanan dan kayu bakar. Perempuan juga telah mengalami eksploitasi seksual, termasuk dalam perlindungan situs warga sipil, dilaporkan oleh pengungsi laki-laki internal.

Serangan ini mengakibatkan pemindahan paksa ribuan warga sipil, banyak di antaranya telah terhalang dari mencari perlindungan dalam situs perlindungan UNMISS untuk warga sipil di Bentiu, Unity, karena sebagian pertahanan SPLA yang ada di sekitar Bentiu dan Rubkona dan SPLA pos pemeriksaan di sekitar situs. Lonjakan lain dalam pertempuran di pertengahan Juni menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia mirip dengan yang didokumentasikan setelah awal serangan. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2105/655, 2015, hal. 9)

Pada tanggal 19 Desember 2014, UNMISS merilis sebuah laporan hak asasi manusia masyarakat pada penyelidikan atas serangan pada 29 Oktober 2014

melawan Bentiu dan Rubkona di wilayah Unity. Temuan menunjukkan bahwa setidaknya 11 warga sipil tewas, termasuk dua wanita dan seorang anak, dan bahwa beberapa perempuan diperkosa oleh pasukan oposisi selama serangan itu.

Pada tanggal 9 Januari 2015, UNMISS merilis sebuah laporan hak asasi manusia merinci penyelidikan serangan terhadap warga sipil di Bentiu dan Bor pada bulan April 2014. Laporan itu menemukan alasan untuk percaya bahwa setidaknya 19 warga sipil tewas di Rumah Sakit Sipil Bentiu dan bahwa sekitar 287 warga sipil tewas di masjid Kalibalek oleh pasukan oposisi ketika mereka sementara menguasai Bentiu pada 15 April 2014. laporan itu juga menyimpulkan bahwa setidaknya 47 warga sipil tewas ketika massa menyerang perlindungan UNMISS situs warga sipil di luar Bor dua hari kemudian, dan yang di kedua serangan, korban sengaja ditargetkan atas dasar etnis, kebangsaan atau dirasakan dukungan untuk salah satu pihak dalam konflik. Laporan menyimpulkan bahwa serangan-serangan bisa mencapai kejahatan perang. Hampir sembilan bulan setelah serangan berlangsung, belum ada yang bertanggung jawab.

Investigasi dugaan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan terus berlanjut di beberapa daerah negara itu. UNMISS sedang menyelidiki laporan serangan oleh SPLA pada sekelompok pedagang di Tharwanyiel di Unity pada tanggal 12 Desember 2014 di mana beberapa orang tewas. Dugaan penembakan, yang mengakibatkan kematian warga sipil dan perpindahan dan perusakan properti, juga dilaporkan di daerah New Fangak dari Jonglei. permusuhan yang terus berlanjut, bagaimanapun, telah membuat verifikasi sulit.

Kekerasan antar komunal terus memiliki dampak negatif pada situasi hak asasi manusia, khususnya di Lakes dan Eastern Equatorian. Dua anggota Dewan Perwakilan Negara di Lakes ditahan sejak 24 Oktober 2014, karena diduga membantu pemuda bersenjata untuk melawan upaya Pemerintah untuk memisahkan dua komunitas lokal untuk mengurangi kekerasan. Para tahanan belum didakwa dengan kejahatan atau diberikan akses ke penasihat hukum. Serta, polisi nasional mencegah UNMISS dari melakukan investigasi dan wawancara tahanan terkait dengan insiden kekerasan antar komunal yang terjadi pada 6 Desember di Torit County, di mana beberapa warga sipil tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Laporan yang diterima oleh UNMISS menunjukkan bahwa pasukan keamanan menanggapi insiden itu pelanggaran HAM berkomitmen, termasuk penjarahan properti dan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan.

Selama periode pelaporan tersebut, anggota Satuan Tugas Negara Monitoring dan Mekanisme pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak-anak oleh semua pihak dalam konflik, termasuk perekrutan dan penggunaan anak-anak Pelaporan, mencatat total 46 insiden, yang mempengaruhi 859 anak-anak (534 anak laki-laki dan 325 perempuan). Dari 46 insiden, 12 diverifikasi, yang mempengaruhi 659 anak (349 laki-laki dan 310 perempuan).

33 sekolah di Sudan Selatan yang digunakan untuk tujuan militer; PBB terus mendesak di berbagai tingkatan untuk pelaku bersenjata untuk meninggalkan sekolah. Sementara itu, Dana Anak-anak PBB (UNICEF) dan mitra pelaksana diidentifikasi dan terdaftar 128 anak tanpa pendamping, yang sekarang menerima program pencarian keluarga dan layanan reunifikasi. Sejak pecahnya konflik, total



7.116 anak-anak telah terdaftar sebagai salah ditemani, terpisahkan atau hilang, 658 di antaranya telah bersatu kembali dengan keluarga mereka. Sejak pertengahan Desember 2014, lebih dari 140.000 anak-anak telah dicapai dengan layanan perlindungan anak yang spesifik. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/118, 2015, hal. 11)

### C. Menciptakan Kondisi Kondusif untuk Pengiriman Bantuan Kemanusiaan

Pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak telah lama dipandang oleh komunitas kemanusiaan sebagai inti dari kegiatan perlindungan. Dalam operasi penjaga perdamaian PBB yang terintegrasi, misi dapat dimandatkan untuk memfasilitasi dan/atau menciptakan kondisi keamanan yang diperlukan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pelaku PBB di daerah misi, dan, di situasi yang ekstrem, dapat diminta untuk mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan dengan cara militer. Polisi juga berkontribusi untuk kegiatan ini melalui penyediaan rute keamanan di *camp* pengungsian, serta manajemen ketertiban umum selama distribusi barang bantuan.

Badan-badan kemanusiaan PBB dan LSM melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan dijalankan oleh warga sipil, baik warga asli maupun asing. (Inter-AgencyStandingCommittee, 1999) oleh karena itu, aktor kemanusiaan adalah warga sipil yang berhak atas perlindungan fisik di bawah mandat POC. Sementara menciptakan kondisi keamanan yang kondusif untuk pengiriman sipil yang dipimpin bantuan kemanusiaan kadang-kadang dimasukkan di bawah mandat POC dan berkontribusi secara tidak langsung terhadap lingkungan perlindungan. Aktor kemanusiaan mempertahankan netralitas mereka, imparialitas dan independensi operasional (prinsip kemanusiaan) untuk penerimaan mereka oleh

semua aktor dan dengan perlindungan keamanan, maka memperkuat kemampuan mereka untuk mengakses mereka yang membutuhkan untuk menyampaikan bantuan mereka. Akibatnya, mempertahankan perbedaan yang jelas antara peran dan fungsi pelaku kemanusiaan sebagai aktor politik dan militer, khususnya dalam situasi konflik dan pasca konflik, merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan operasi di mana organisasi kemanusiaan dapat melaksanakan mandat mereka secara efektif dan aman.

Melalui resolusi 2155 tahun 2014, UNMISS diberikan mandat menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang tertulis dalam paragraf 4 poin c:

- i. To contribute to the creation of the conditions for the delivery of humanitarian assistance, including by helping to establish the necessary security conditions and by exercising its good offices, confidence building and facilitation, so as to allow, in accordance with relevant provisions of international law and United Nations guiding principles of humanitarian assistance, the full, safe and unhindered access of relief personnel to all those in need in South Sudan and timely delivery of humanitarian assistance, in particular to internally displaced persons and refugees;*
- ii. To ensure the security and freedom of movement of United Nations and associated personnel where appropriate, and to ensure the security of installations and equipment necessary for implementation of mandated tasks;*

UNMISS bekerja sama dengan mitra kemanusiaan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang terkena dampak krisis. Aset misi dan personel digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan dengan aman dan memberikan kekuatan perlindungan untuk konvoi kemanusiaan atas permintaan. Operasi kemanusiaan yang secara signifikan telah meningkatkan juga meningkatkan jumlah permintaan untuk perlindungan pada konvoi kemanusiaan, fasilitas PBB, dan aset di semua wilayah yang terkena dampak. Hal tersebut merupakan tantangan besar, karena diperlukan keputusan yang sulit pada prioritas tugas perlindungan. Dalam penerapan 'Jasa Baik', atas permintaan Koordinator Kemanusiaan PBB, UNMISS diminta untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan. Bersama dengan itu, para pelaku kemanusiaan berusaha menemukan alternatif untuk manajemen keamanan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pengawalan bersenjata dan perlindungan kekuatan dari UNMISS.

Dalam menanggulangi keadaan yang tidak laik di situs untuk perlindungan warga sipil, UNMISS telah bekerja dengan mitra untuk mempersiapkan situs baru di Juba, Bor, Bentiu dan Malakal. Upaya relokasi telah dimulai di semua situs baru untuk mengatasi kekhawatiran mengenai kondisi kesehatan dan hidup. Pada 17 Juli, lebih dari 15.000 pengungsi telah direlokasi. UNMISS melakukan usaha terbaiknya, tanpa teknik dan dukungan logistik layanan Misi dan telah berjuang untuk meningkatkan keadaan situs yang padat yang ada sebelum musim hujan mencapai puncaknya. Tanpa sumber daya tambahan, khususnya penerbangan angkat-berat dan rekayasa teknik, militer dan polisi, UNMISS kesulitan

menampung gelombang pengungsi baru. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 11)

Misi, atas permintaan, memberikan dukungan untuk operasi bantuan kemanusiaan di berbagai lokasi di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik. Misalnya, setelah pertempuran di awal Agustus di Bunj, Maban, wilayah Upper Nile, antara pasukan pertahanan Maban dan tentara SPLA, personel militer UNMISS memberikan perlindungan untuk memudahkan operasi bantuan di kota dan kamp-kamp pengungsi di dekatnya. Perencanaan bersama dengan mitra kemanusiaan untuk membangun kerangka keamanan yang koheren untuk 2014/15 operasi kemanusiaan musim kemarau dan pra posisi persediaan sedang berlangsung.

UNMISS juga melakukan advokasi yang kuat dengan semua otoritas yang relevan untuk menjamin kebebasan bergerak untuk pasukan penjaga perdamaian dan personel lainnya, terutama di daerah berisiko tinggi konflik dan pengungsian besar-besaran. Dalam semua kegiatan, mempertahankan postur berimbang Misi sangat penting untuk memastikan keamanan staf dan menjaga kredibilitas dan akses kepada masyarakat yang terkena dampak. Pertimbangan ini telah memberitahu semua perencanaan operasional, dan pelatihan yang disediakan untuk staf UNMISS yang relevan tentang pedoman koordinasi sipil-militer dan prinsip-prinsip. Ketika dipanggil, kepemimpinan Mission menggunakan 'Jasa Baik' untuk terlibat dengan aktor bersenjata di lokasi untuk mengatasi insiden tertentu yang mempengaruhi akses kemanusiaan atau keamanan personel kemanusiaan. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/821, 2014, hal. 13)

Pada 24 Desember semua pengungsi di situs UNMISS Tomping di Juba (sekitar 20.000 orang) telah pindah secara sukarela ke situs perlindungan baru di dekat UN House di Juba. Dalam situs perlindungan Malakal, hampir 15.000 orang yang pindah ke daerah dengan kondisi membaik, sementara pekerjaan konstruksi untuk memperpanjang situs baru (dijadwalkan akan selesai pada akhir Februari), akan menampung sisa pengungsi. Sementara ketidakamanan dan kurangnya sumber daya keuangan dan rekayasa menghambat pembangunan situs baru di Bentiu, karya drainase yang diperlukan dan perluasan situs akan dilakukan pada musim kemarau.

Distribusi bantuan kemanusiaan dalam situs perlindungan melanjutkan efektif, dengan beberapa pengecualian. ketegangan antar komunal dalam perlindungan UNMISS situs warga sipil di Malakal, termasuk upaya kekerasan oleh pemuda pengungsi untuk memblokir bantuan kemanusiaan ke kelompok etnis tertentu, sementara mengganggu pelayanan kemanusiaan pada pertengahan November. Dari akhir November 2014 sampai 2 Februari 2015, Program Pangan Dunia (WFP) ditangguhkan distribusi makanan di salah satu dari tiga situs perlindungan di Juba setelah staf kemanusiaan diserang. Di Bentiu, pendaftaran biometrik semua 53.000 orang pengungsi di situs perlindungan, yang memberikan dasar bagi pemberian pelayanan, disimpulkan. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/118, 2015, hal. 8)

Melalui kerjasama erat dengan Kantor untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Juba dan mitra kemanusiaan lokal dan perwakilan di sektor, UNMISS melakukan 4226 *force protection task* untuk memberikan keamanan pengiriman makanan, konvoi jalan, pergerakan kapal dan kegiatan kemanusiaan

lainnya. Pada beberapa kesempatan pada bulan September dan Oktober 2015, UNMISS memberikan perjalanan yang aman untuk pengungsi dari tepi barat Sungai Nil ke situs perlindungan di Malakal, serta untuk mereka yang secara sukarela kembali ke desa mereka di tepi barat.

Untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, United Nations Mine Action Service dikerahkan dengan 14 tim teknis untuk melakukan operasi survei dan pembersihan di seluruh Sudan Selatan. Untuk memastikan akses di daerah yang paling membutuhkan, secara teratur memverifikasi keselamatan lapangan terbang di Malakal dan daerah yang dipergunakan Program Pangan Dunia untuk menurunkan bantuan makanan di Bentiu. (Security Council, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/902, 2015, hal. 12)

D. Mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities* (CoH) dan *Monitoring and Verification Mechanism* (MVM)/*Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism* (CTSAMM)

Penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities*) mencegah pihak terlibat dalam tindakan bermusuhan, yang dapat mencakup tindakan militer, seperti menembaki pihak lain, dan tindakan non-militer, seperti propaganda. Pemisahan kekuatan adalah proses dimana para pihak akan menarik diri dari kontak dan memposisikan diri untuk mencegah kembalinya konflik. Verifikasi, supervisi, dan monitoring adalah langkah-langkah untuk menciptakan akuntabilitas dan menjamin implementasi yang tepat dari perjanjian tersebut.

Pasukan penjaga perdamaian bertindak untuk menghentikan dan mencegah kekerasan, dengan melakukan kontrak militer antara pihak yang melakukan gencatan senjata, sehingga meningkatkan biaya ekonomi, strategis, dan politik

untuk kembali ke konflik. (Yilmaz, 2006, hal. 27-29) Pasukan perdamaian dengan sengaja disembarkan ke daerah-daerah gencatan senjata untuk membangun dan mempertahankan pemisahan kekuatan. Namun, pasukan perdamaian adalah sumber daya fleksibel dan dapat digunakan untuk pelatihan, dukungan logistik, pengawasan DDR, *mine-clearing*, pengendalian massa, penegakan hukum, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan pemantauan dan verifikasi, di antara banyak peran potensial lainnya. Beberapa isu-isu mengenai pasukan penjaga perdamaian dapat membuat pertentangan dalam negosiasi gencatan senjata. Beberapa pihak mungkin melihat kehadiran pasukan perdamaian sebagai pelanggaran kedaulatan mereka. Para pihak mungkin tidak setuju pada sumber dan komposisi pasukan penjaga perdamaian dan juga tidak setuju pada fungsi penjaga perdamaian tertentu. Untuk menghindari risiko menggelincirkan negosiasi gencatan senjata, pihak dapat berkomitmen untuk negosiasi penggunaan pasukan penjaga perdamaian di kemudian hari. (The Ceasefire Drafter's Handbook, 2013)

Dengan disahkannya resolusi Dewan Keamanan 2155 (2014), UNMISS telah diberi mandat untuk memberikan keamanan situs untuk monitoring dan verifikasi mekanisme dari *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) dan untuk mendukung kerja dari mekanisme seperti yang dijelaskan dalam penghentian perjanjian permusuhan. Pasukan UNMISS dari anggota Serikat IGAD akan beroperasi sepenuhnya dalam komando dan kontrol arsitektur UNMISS.

IGAD, yang melakukan konsultasi individu, pembicaraan proxy dan pembicaraan langsung, dimulai proses negosiasi formal antara pihak-pihak di

Addis Ababa pada tanggal 4 Januari. Setelah sekitar 20 hari pembicaraan, pada tanggal 23 Januari Pemerintah dan SPLM/A-IO menandatangani kesepakatan Cessation of Hostilities (CoH). Tahap kedua dari dialog politik dan proses rekonsiliasi nasional dilanjutkan di Addis Ababa pada 3 Maret 2016. Selama putaran itu, kedua pihak mencapai kesepakatan pada *Monitoring and Verification Mechanism (MVM)/Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism (CTSAMM)*. Sementara itu, pertempuran di berbagai lokasi terus terjadi dan kedua belah pihak tetap melanggar CoH. (Security Council, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 3)

UNMISS telah bekerja sama dengan komisi teknis IGAD di Juba dan memberikan dukungan logistik untuk penyebaran monitoring dan verifikasi tim IGAD di lokasi. Dengan dukungan logistik UNMISS, tim prioritas telah berhasil dikerahkan untuk enam lokasi: Bor (Jonglei) pada tanggal 1 April, Bentiu (Unity) pada 5 April, Malakal (Upper Nile) pada tanggal 15 April, Nasser (Upper Nile) pada 3 Juni, Melut (Upper Nile) pada tanggal 17 Juni dan Pariang (Unity) pada 14 Juli 2014. Dukungan akan disediakan pada penggantian biaya, kapasitas sumber daya dan prioritas dasar, modalitas yang sedang diselesaikan dalam nota kesepahaman antara UNMISS dan IGAD.

Pada tingkat kantor pusat, mekanisme koordinasi bersama telah dibentuk untuk membantu dalam penyebaran dan penyediaan dukungan logistik kepada tim monitoring dan verifikasi IGAD. Di tingkat wilayah, tim berkoordinasi dengan pusat-pusat operasi dan pejabat senior penghubung militer untuk menjamin sinergi perlindungan kekuatan dan patroli. Kunjungan lapangan bersama oleh tim



dan UNMISS juga berlangsung. Berbagi informasi juga dikoordinasikan melalui UNMISS di Juba dan di tingkat negara.(SecretaryGeneral/2014/537)

Pada tanggal 23 Februari 2015 fase tiga dari perundingan damai yang dimediasi oleh IGAD dilanjutkan di Addis Ababa. Ini mengikuti kesepakatan antara Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit, dan pemimpin SPLM/A-IO, Riek Machar Teny, pada 1 Februari, untuk mendirikan sebuah pemerintahan transisi persatuan nasional dengan 9 Juli 2015 dan untuk menyelesaikan semua luar dasar masalah, termasuk pembagian kekuasaan, paling lambat 5 Maret. Batas waktu dari 5 Maret sebagai kesimpulan dari perjanjian damai diputuskan oleh para pemimpin IGAD sehingga memungkinkan untuk fase pra-transisi akan dimulai pada 9 April, diikuti oleh instalasi pemerintahan transisi oleh 9 Juli, bertepatan dengan berakhirnya amanat Pemerintah saat ini. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2015/296, 2015, hal. 1)

Selain logistik dan dukungan kehidupan yang disediakan di bawah pengaturan bilateral, UNMISS terus membantu Monitoring dan Mekanisme Verifikasi IGAD melalui Komite Teknis Bersama IGAD di Juba. Ini termasuk penyediaan perlindungan kekuatan dan logistik dan layanan dukungan administrasi (akomodasi, transportasi, air, makanan, bahan bakar, listrik dan penutup medis) untuk Monitoring IGAD dan Verifikasi Tim co-terletak di pangkalan UNMISS.

Dari penyebaran mereka Maret 2014 hingga tanggal 31 Juli 2015, Tim Monitoring IGAD dan Verifikasi menyelidiki total 46 insiden, yang berjumlah pelanggaran Perjanjian Penghentian Permusuhan(CoH) dari 23 Januari 2014. Dari

jumlah tersebut, 19 pelanggaran dikaitkan dengan pasukan Pemerintah , 23 untuk SPLM / A di Oposisi dan 4 untuk kedua belah pihak. tim IGAD dilakukan beberapa penyelidikan di sebagian kabupaten dari Negara Kesatuan, serta di Malakal dan Melut, Upper Nile State. Semua ini mengakibatkan pelanggaran yang dikeluarkan terhadap kedua belah pihak. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2105/655, 2015, hal. 12)

Pada tanggal 6 Agustus 2015, Pemerintah, SPLM/A -IO dan mantan tahanan kembali perundingan tentang perjanjian perdamaian kompromi di Addis Ababa. Bidang utama perselisihan antara pihak-pihak tergolong tiga isu utama, yaitu: (a) pengaturan pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden Pertama; (B) distribusi posisi di pemerintah Negara Bagian Jonglei, Persatuan dan Upper Nile Serikat; (C) pengaturan keamanan, khususnya proses untuk integrasi pasukan oposisi ke SPLA dan pertanyaan tentang demiliterisasi Juba. SPLM / A Oposisi meminta agar isu keempat federalisme juga ditangani.

Pada tanggal 17 Agustus, menyusul konsultasi panjang antara pihak-pihak dan para pemimpin Ethiopia, Kenya, Sudan dan Uganda, SPLM / A-IO dan mantan tahanan menandatangani kompromi perjanjian perdamaian(*Cease-fire*). Pemerintah memutuskan untuk hanya paraf perjanjian, mengungkapkan keberatan tentang beberapa ketentuannya, dan meminta waktu 15 hari tambahan untuk konsultasi lebih lanjut dengan konstituen nya. Perdana Menteri Ethiopia menyatakan bahwa Pemerintah dan SPLM / A di oposisi juga telah sepakat untuk menghormati gencatan senjata dan memungkinkan akses kemanusiaan penuh selama periode 15-hari yang diberikan untuk konsultasi. (SecretaryGeneral/2015/655 hal 4)

Setelah berlakunya gencatan senjata permanen (*permanent cease-fire*), Monitoring dan Mekanisme Verifikasi IGAD, yang didirikan sebagai bagian dari Kesepakatan Penghentian Permusuhan sebelumnya pada 23 Januari 2014, memulai transisi ke dalam Mekanisme Gencatan Senjata dan Pengaturan Pengawasan Keamanan. Setelah membuat operasional, Mekanisme yang akan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan dan akan melaporkan langsung ke Komisi Evaluasi Pemantauan Bersama. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian damai, tanggung jawab Mekanisme tersebut akan secara signifikan lebih besar daripada yang dianggap berasal dari pendahulunya, mengingat bahwa itu akan bertugas memantau dan melaporkan lengkap pengaturan keamanan yang ditetapkan dalam perjanjian, termasuk pemisahan, perakitan dan barak pasukan dari penandatanganan dan pelaksanaan ketentuan keamanan yang berkaitan dengan Juba.

UNMISS sudah mendukung enam monitoring dan verifikasi tim IGAD dikerahkan di Bor, Bentiu, Malakal, Melut, Nassir dan Juba melalui penyediaan perlindungan kekuatan dan bantuan logistik dan teknis. Mengingat tanggung jawab tambahan ditugaskan ke Mekanisme Gencatan Senjata dan Transisi Pengaturan Keamanan Monitoring, yang IGAD Pemantauan saat ini dan Mekanisme Verifikasi berencana untuk memperluas operasinya untuk memasukkan sampai dengan 12 tim. Diusulkan bahwa pekerjaan Misi untuk memperpanjang perlindungan kekuatan saat ini dan pengaturan bantuan logistik dan teknis kepada tim tambahan, yang juga akan terletak di dalam basis UNMISS yang ada. dukungan tambahan juga bisa termasuk menggunakan PBB perwira penghubung militer untuk bekerja dengan tim di daerah tertentu dari operasi,

memberikan bantuan dengan penilaian ancaman dan informasi kesadaran situasional, terlibat dalam perencanaan patroli dengan tim, mendukung pelaporan pelanggaran gencatan senjata dan monitoring situs kantonisasi dan mendukung ratifikasi matriks pelaksanaan peta gencatan senjata utama.

Untuk membuat operasional Gencatan Senjata awal dan Transisi Pengaturan Keamanan Mekanisme Pemantauan kunjungan penilaian dan registrasi dan pemeriksaan personil dan persenjataan di situs barak, memaksa gerakan perlindungan akan dilakukan melalui campuran gerakan udara dan operasi darat atau melalui unit kelautan kekuatan di muka kedatangan tim monitoring dan verifikasi, seperti izin sumber. Untuk mendukung pemantauan lanjutan dari situs barak, UNMISS sedang mengkaji kepraktisan membangun pola patroli sekitar satu kunjungan ke beberapa 50 situs barak setiap 7 sampai 10 hari. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/899, 2015, hal. 7)

Setelah adopsi resolusi 2241 tahun 2015 oleh Dewan Keamanan, UNMISS disesuaikan kegiatannya dengan tugas tambahan mendukung pelaksanaan perjanjian damai, sambil terus melaksanakan empat tugas yang diamanatkan diuraikan di atas. Dalam surat tertanggal 16 Oktober 2015, Ketua IGAD memberitahu mantan Presiden Botswana, Festus Mogae, diangkat menjadi kepala Pemantauan Bersama dan Komisi Evaluasi. Komisi bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan damai dan mandat dan tugas dari Pemerintah Transisi Persatuan Nasional. UNMISS, sebagai anggota resmi dari Komisi, saat ini sedang berkonsultasi dengan Ketua untuk menentukan apa bentuk dukungan Misi dari UNMISS yang akan diambil.

Untuk mendukung Mekanisme Gencatan Senjata dan Transisi Pengaturan Keamanan Monitoring, UNMISS, dalam koordinasi dengan IGAD, mulai merencanakan untuk penyebaran tambahan empat tim monitoring dan verifikasi. Pemantauan dan verifikasi tindak separatisme adalah tugas pokok untuk Mekanisme, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pendaftaran dan pemeriksaan personil. UNMISS sedang mengembangkan *road map* untuk mendukung operasinya. Dalam surat tanggal 30 Oktober, Departemen Pertahanan Ethiopia memberitahu Utusan Khusus IGAD untuk Sudan Selatan yang telah menunjuk Mayor Jenderal (Purn.) Molla Hailemariam ke kursi Mekanisme tersebut.

Berdasarkan resolusi 2241 tahun 2015 juga, pada 12 Oktober tentara Uganda mulai menarik diri dari Sudan Selatan, dengan pengecualian dari Western Equatoria State, di mana pasukan menanggapi ancaman serangan dari Lord's Resistance Army terus terjadi, sesuai dengan persetujuan. UNMISS telah mengkonfirmasi penarikan tentara dari Bor dan sebagian besar dari Juba, dan selain kehadirannya di Western Equatoria State, hanya beberapa peralatan tetap ada. Pada *workshop* tentang gencatan senjata permanen dan pengaturan keamanan transisi yang diadakan pada bulan September, para pihak sepakat bahwa perlucutan senjata, demobilisasi dan pemulangan aktor keamanan non-negara akan dilaksanakan setelah pembentukan arsitektur nasional untuk pelaksanaan gencatan senjata permanen dan unifikasi kekuatan, dan pengembangan rencana untuk identifikasi kekuatan non-negara.

Demikian pula, sebuah komite amandemen konstitusi nasional belum dibentuk. UNMISS mempersiapkan diri untuk mendukung badan tersebut, yang

mempunyai tugas, antara lain, untuk menyusun RUU amandemen konstitusi yang akan menggabungkan persyaratan perjanjian perdamaian ke dalam Konstitusi (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/902, 2015, hal. 12)